

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PERENCANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN KANGKUNG, KOTA BANDAR LAMPUNG



Hediyati Anisia Br Sinamo¹⁾

¹⁾ Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung
email: hediyatianisia@gmail.com

Abstrak

Meskipun perencanaan partisipatif telah diamanatkan sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, berbagai daerah di Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan pembanguna, diantaranya kemiskinan, ketimpangan wilayah, hingga tempat tinggal yang kurang layak huni di suatu daerah. Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan penyusunan program KOTAKU di 26 kelurahan prioritas, yang merupakan satu program peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran masyarakat dan partisipasi masyarakat. Namun fenomena yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa, ternyata masih terdapat masyarakat yang belum berpartisipasi dalam Program KOTAKU khususnya pada proses perencanaan. Tulisan ini mendiskusikan sejauh apa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Kajian mengenai tingkat partisipasi bertujuan untuk mengkaji 1) Kehadiran dalam pertemuan, 2)Keaktifan dalam memberikan input, sasaran dan masukan, 3)Keterlibatan dalam menyusun concept plan, dan 4) Keterlibatan dalam menyetujui draft rencana. Kajian tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program KOTAKU dengan menggunakan metode statistik deskriptif yang mendeskripsikan hasil skoring masing-masing kriteria yang dikelompokkan kedalam tingkat dan tipologi partisipasi. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Kangkung adalah termasuk dalam tipologi *Informing*, bahwa pada tahap ini, masyarakat diberikan informasi mengenai hak dan kewajiban. Namun hanya bersifat satu arah dan masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan Program KOTAKU belum diberikan kesempatan untuk mempengaruhi apapun, dan tidak terjadi umpan balik antara pemegang kekuasaan dan masyarakat.

Kata Kunci : Perencanaan Partisipasi, Proses Perencanaan, Tingkat Partisipasi

Abstract

Although participatory planning has been mandated in many regulations and policies, to realize sustainable development, many regions in Indonesia are still dealing with some development issues such as poverty, lagging regions, which lead to less habitability of living area. Bandar Lampung City has carried out the preparation of the KOTAKU program in 26 priority villages, which is a program to improve the quality of slum settlements by building a collaboration platform through increasing community roles and community participation. However, the phenomenon that occurs in the field shows that there are still people who have not participated in the KOTAKU Program, especially in the planning process. This paper discusses about to what extent the participatory level of community in the planning process of KOTAKU Program. Participation level of community is determined by 4 criteria: 1) the meeting presence of stakeholders, 2) the activeness of stakeholder in giving input and feedback during public discussion, 3) the involvement of stakeholders in formulating the concept plan, and 4) Involvement in approving the draft plan. The analysis method is using statistical descriptive which describes the total score for each criteria and groups the level and typology of stakeholder participatory. The result show the community participation in the planning process of the KOTAKU Program in Kangkung Village is included in the Informing typology, that at this stage, the community is given information about their rights and obligations.

However, it is only one-way, and there is no feedback between the power holders and the community.

Keywords: *Participation Planning, Planning Process, Participation Level*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang pada hakikatnya harus berkelanjutan antara berbagai dimensi, baik dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat (Isbandi, 2005). Perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, sebagaimana tertulis dalam tahap proses perencanaan pada Undang-Undang no. 25 Tahun 2004 berbunyi: melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintah. Rencana pembangunan daerah diarahkan sebagai perencanaan yang inklusif, sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah pada pasal 262 ayat 1 yang menyatakan tahapan perencanaan pembangunan harus bersifat inklusif, yang dalam proses penyusunannya dilibatkan kelompok yang termarginalkan.

Namun, dalam perencanaan pembangunan terdapat kecenderungan pada pemerintah yang melibatkan masyarakat hanya pada tahap pelaksanaan. Tjahjoto dkk (2014) menjelaskan konsep partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, keterlibatan masyarakat hanya sebatas konteks “fase pembangunan” bukan pada “fase perencanaan”. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diperlukan mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan sampai tahap evaluasi (Deviyanti, 2013). Belum ada aturan normatif pula yang mengatur sejauh apa masyarakat harus terlibat dalam sebuah proses perencanaan.

Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung menjadi salah satu perkotaan yang mengalami permasalahan kekumuhan. Pada tahun 2014, Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor: 974/V.32/HK/2014 tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2014 menetapkan 26

kelurahan tergolong kumuh yang terdapat di Kota Bandar Lampung yang perlu mendapatkan penanganan. Fenomena permukiman kumuh ditangani dengan salah satu program yaitu Program Kota Tanpa Kumuh yang selanjutnya disingkat (KOTAKU). Program KOTAKU merupakan program peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan membangun *platform* kolaborasi melalui peningkatan peran masyarakat dan partisipasi masyarakat.

Di Kota Bandar Lampung Program KOTAKU dilaksanakan di 67 kelurahan dengan 26 kelurahan prioritas penanganan karena tergolong kumuh berat. Kelurahan Kangkung merupakan kelurahan yang memiliki luas permukiman kumuh terluas ke-2 (dua) yang mendapatkan penanganan kumuh prioritas. Luasan permukiman kumuh Kelurahan Kangkung adalah sebesar 21,03 hektar. Program KOTAKU diselenggarakan pada tahun 2017 di Kelurahan Kangkung. Dokumen Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU menjelaskan bahwa, dalam pelaksanaannya terdapat perencanaan secara *top-down* dan perencanaan *bottom-up*. Diketahui bahwa dalam perencanaan *bottom-up* keterlibatan masyarakat sangat penting dalam tahap-tahap penyelenggaraan Program KOTAKU di Kelurahan Kangkung mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan/implementasi, tahap keberlanjutan dan tahap kegiatan menerus dan berkala.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program KOTAKU sudah berhasil dilaksanakan di Kelurahan Kangkung, itu dibuktikan dengan adanya dokumen NUAP (*Neighborhood Upgrading Action Plan*) pada tingkat kelurahan yang merupakan output dari proses perencanaan. Namun fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa, ternyata masih terdapat masyarakat yang belum berpartisipasi dalam Program KOTAKU khususnya pada proses perencanaan. Informasi mengenai pelaksanaan

Program KOTAKU belum diketahui secara merata oleh seluruh masyarakat. Pentingnya peran keterlibatan masyarakat pada proses perencanaan dijelaskan dalam Girsang (2011) yang berpendapat, bahwa pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam proses perencanaan program dapat menciptakan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) masyarakat terhadap keberlanjutan program-program yang dilakukannya. Berdasarkan fakta tersebut, maka perlunya dilakukan penelitian tentang tingkat partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan Program KOTAKU.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program KOTAKU adalah statistik deskriptif. Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan maka akan diukur melalui 4 kriteria (Tjahjono dkk, 2014), yakni :

1. Kehadiran dalam pertemuan
2. Keaktifan dalam memberikan input, sasaran dan masukan
3. Keterlibatan dalam menyusun concept plan
4. Keterlibatan dalam menyetujui draft rencana

Dari ke-4 (empat) indikator tersebut akan dikaitkan dengan tipologi partisipasi masyarakat menurut Arnstein dalam Chusnah (2008), yaitu 8 (delapan) tangga partisipasi, yang terdiri dari: 1) *manipulation*, 2) *therapy*, 3) *informing*, 4) *consultation*, 5) *placation*, 6) *partnership*, 7) *delegated power* dan 8) *citizen control*. Dimana masing-masing tangga partisipasi memiliki bobot sesuai dengan urutannya. Sebagaimana dijelaskan dalam konsep tangga partisipasi Arnstein, tingkat partisipasi masyarakat yang dikaji adalah masyarakat kelurahan Kungkung.

Tabel 1. Skor Tipologi Tingkat Partisipasi

No Tangga	Tingkat partisipasi	Bentuk Partisipasi	Jumlah Skor
-----------	---------------------	--------------------	-------------

8	<i>Citizen Control</i>		491,7 sampai 552
7	<i>Delegated Power</i>	<i>Citizen Power</i>	431,3 sampai 491,6
6	<i>Partnership</i>		370,9 sampai 431,2
5	<i>Placation</i>		310,5 sampai 370,8
4	<i>Consultation</i>	<i>Tokenism</i>	251 sampai 310,4
3	<i>Informing</i>		189,7 sampai 250
2	<i>Therapy</i>		129,3 sampai 189,6
1	<i>Manipulation</i>	<i>Non-Partisipan</i>	69 sampai 129,2

Sumber : Hedyati, 2021

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuisioner. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan: teknik *probability sampling* melalui teknik *proportionate stratified random sampling*, atas dasar jumlah masyarakat berdasarkan usia produktif. Jumlah sampel dengan responden dari masyarakat umum didasarkan pada rumus *slovin* yaitu rumus penentuan jumlah sampel. Berikut penjelasannya. Rumus *Slovin* :

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Jadi, bila jumlah populasi di RT prioritas Kelurahan Kungkung sebanyak 9254 jiwa, dengan asumsi galat pendugaan 5%. Maka:

$$n = \frac{9254}{9254 \cdot 0,05^2 + 1}$$

$$n = 383,42 \cong 384$$

Jadi jumlah sampel dengan kriteria sampel yang telah dijelaskan diatas yaitu 384 sampel. Karena jumlah sampel masih dianggap cukup besar, maka dilakukan perhitungan sampel kembali berdasarkan *Nomogram Harry King*. Dengan jumlah populasi sebesar 384 jiwa, dengan asumsi galat pendugaan 5%. Bila jumlah populasi di RT

prioritas Kelurahan Kungkung sebanyak 384 jiwa, dengan asumsi galat pendugaan 5% (taraf kepercayaannya 95% = 1,195). Maka:

$$n = 0,4 \times 384 \times 1,195$$

$$n = 183,552 \cong 184$$

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini, dengan kriteria sampel yang telah dijelaskan diatas yaitu 184 sampel. Dalam penentuan lokasi pengambilan sampel didasarkan pada RT yang termasuk bagian wilayah kumuh dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Bandar Lampung. Perhitungan jumlah sampel dari setiap RT di Kelurahan Kungkung dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Responden usia produktif tiap RT} = \frac{x}{y} \times n$$

Keterangan:

x : Jumlah penduduk usia produktif pada RT kawasan kumuh

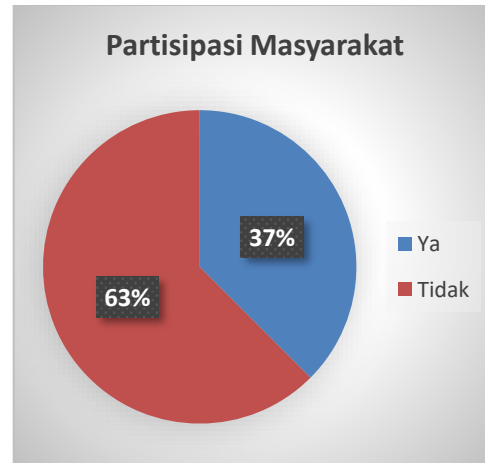
y : Jumlah penduduk di Kawasan Kumuh

n : Total responden (Rumus *Nomogram Harry King*)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Program KOTAKU

Keberhasilan proses perencanaan suatu program yang bersifat *bottom-up* planning tidak dapat terlepas dari adanya partisipasi anggota masyarakat. Kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan program tersebut. Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan ke masyarakat di 24 RT yang tergolong kumuh di Kelurahan kungkung, yaitu sebanyak 184 responden, maka diperoleh hasil sebagai berikut



Sumber : Hasil Analisis, 2021

Gambar 1. Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Program Kotaku di Kelurahan Kungkung

Hasil yang diperoleh dari tanggapan masyarakat melalui 184 sampel yang disebar adalah, sebanyak 37% masyarakat menyatakan ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Kungkung. Sementara itu, sebanyak 63% masyarakat menyatakan tidak ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Kungkung. Mereka merasa tidak mengetahui adanya program KOTAKU yang akan dilaksanakan di Kelurahan Kungkung. Sehingga mereka tidak berkesempatan untuk ikut dalam proses perencanaan program tersebut.

3.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program KOTAKU

Tingkat partisipasi masyarakat pada proses perencanaan Program KOTAKU, yang dilihat dari 4 indikator yaitu: kehadiran dalam pertemuan; keaktifan dalam memberikan input, saran dan masukan; keterlibatan dalam menyusun *concept plan*; dan keterlibatan dalam menyetujui draft, yang masing-masingnya akan dikorelasikan dengan tipologi Arnstein, yaitu delapan tangga partisipasi masyarakat.

a) Kehadiran Dalam Pertemuan

Dalam analisis kehadiran dalam pertemuan digunakan skala penilaian dengan mengacu pada tipologi Arnstein, yaitu delapan tangga partisipasi masyarakat. Depalan tangga tersebut adalah: a) hadir dengan hak penuh

sebagai penentu keputusan; b) hadir sebagai perwakilan untuk mewakili aspirasi kelompoknya; c) hadir untuk memenuhi tanggungjawab namun dengan porsi yang berbeda dengan stakeholder lain; d) hadir untuk memberikan pengaruhnya dalam proses perencanaan; e) hadir untuk berdiskusi dan berdialog dengan pemerintah dengan jaminan bahwa diskusi yang diadakan akan berpengaruh; f) hadir sebagai informan bagi kelompok masyarakat lainnya; g) hadir hanya sebagai informan pemerintah saja; dan h) hadir hanya sebagai peserta. Berdasarkan hasil tanggapan dari responden yang menyatakan ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan Program KOTAKU, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2. Kehadiran Dalam Pertemuan

No	Variabel	Skala Penilaian	N	Bobot	N x Bobot
1	Kehadiran Dalam Pertemuan	Masyarakat hadir dengan hak penuh sebagai individu dalam penentuan keputusan	0	8	0
		Masyarakat hadir sebagai perwakilan kelompok tertentu untuk mewakilkan aspirasi kelompoknya	0	7	0
		Masyarakat hadir untuk memenuhi tanggung jawab namun dengan porsi yang berbeda dengan stakeholder lain	0	6	0
		Masyarakat hadir untuk memberikan pengaruhnya dalam proses perencanaan	0	5	0
		Masyarakat hadir untuk berdiskusi dan berdialog dengan pemerintah tanpa	52	4	208

jaminan bahwa diskusi yang diadakan akan berpengaruh				
Masyarakat hadir sebagai informan bagi kelompok masyarakat lainnya	6	3	18	
Masyarakat hadir sebagai informan bagi pemerintah	11	2	22	
Masyarakat hadir hanya sebagai peserta	0	1	0	
JUMLAH				248

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Dari tabel kehadiran dalam pertemuan, maka diperoleh hasil bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam tingkat keaktifan hadir dalam pertemuan adalah 248. Jumlah skor tersebut bila mengacu pada tabel jumlah skor tingkat partisipasi termasuk dalam tingkat *informing*. Pada tingkat *informing* dapat diartikan bahwa masyarakat hadir dalam pertemuan yang diadakan oleh penanggungjawab Program KOTAKU, namun hanya bersifat satu arah dan masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan Program KOTAKU belum diberikan kesempatan untuk mempengaruhi apapun, dan tidak terjadi umpan balik antara pemegang kekuasaan dan masyarakat. Sehingga masyarakat yang hadir hanya sebagai informan bagi kelompok masyarakat lainnya.

b) Keaktifan Dalam Memberikan Input, Saran dan Masukan

Untuk mengukur tingkat keaktifan dalam berdiskusi dan mengemukakan pendapat digunakan skala penilaian mengacu pada tipologi Arnstein, yaitu delapan tangga partisipasi masyarakat. Depalan tangga tersebut adalah: a) memberikan input dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi keterbaharuan input yang dimiliki; b) memberikan input dan memiliki keputusan yang mewakili kelompok masyarakat; c) memberikan input yang merupakan

kepentingan bersama; d) memberikan umpan balik dan catatan; e) memberikan input hanya dengan dialog dua arah saja; f) memberikan input hanya untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu; g) memberikan input hanya untuk kepentingan pemerintah saja; h) tidak memberikan input sama sekali. Berdasarkan hasil tanggapan dari responden yang menyatakan ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan Program KOTAKU, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3. Eaktifan Dalam Memberikan Input, Saran Dan Masukan

No	Variabel	Skala Penilaian	N	Bobot	N x Bobot
1	Keaktifan dalam memberikan input, saran dan masukan	Memberikan input dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi keterbaharuan input yang dimiliki	0	8	0
		Memberikan input dan memiliki keputusan yang mewakili kelompok masyarakat	0	7	0
		Memberikan input yang merupakan kepentingan bersama	0	6	0
		Memberikan umpan balik dan catatan	0	5	0
		Memberikan input hanya dengan dialog dua arah saja	6	4	256
		Memberikan input hanya untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu	0	3	0
		Memberikan input hanya untuk kepentingan pemerintah saja	0	2	0
		Tidak memberikan input sama sekali	0	1	0
JUMLAH					256

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan tabel keaktifan dalam memberikan input, saran dan masukan diatas, diketahui bahwa dari 69 responden yang menyatakan ikut berpartisipasi, ternyata seluruhnya aktif memberikan input hanya dengan dialog dua arah saja tanpa tahu apakah saran dan pendapat mereka diperhitungkan atau tidak. Dari hasil uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam keaktifan dalam memberikan input, saran dan masukan memiliki skor 256. Apabila mengacu pada tabel jumlah skoring tingkat partisipasi, maka jumlah skor tersebut masuk dalam tipologi *consultation*, yaitu tangga ke-4 (empat) dari delapan tangga tingkat partisipasi Arnstein. Dalam tahap ini sudah dilakukan konsultasi dan dengar pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang diambil, sayangnya belum diikuti dengan jaminan pendapat masyarakat akan dipertimbangkan dalam kebijakan yang akan dibuat.

c) Keterlibatan Dalam Menyusun Concept Plan

Untuk mengukur tingkat keterlibatan dalam menyusun *concept plan* digunakan skala penilaian mengacu pada tipologi Arnstein, yaitu delapan tangga partisipasi masyarakat. Depalan tangga tersebut adalah: a) terlibat dalam menentukan konsep rencana pembangunan, memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan dan meninjau ulang rencana pembangunan; b) terlibat dalam menentukan konsep rencana pembangunan dan memiliki wewenang menentukan kebijakan yang mewakili kelompoknya; c) terlibat dalam menentukan konsep rencana pembangunan dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang setara dengan pemerintah; d) terlibat dalam menentukan konsep rencana pembangunan dengan memberikan pengaruh; e) ikut serta diskusi saja dalam penentuan konsep rencana pembangunan; f) ikut serta membantu menentukan konsep rencana pembangunan namun hanya untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu; g) ikut serta membantu menentukan konsep rencana pembangunan namun hanya untuk kepentingan pemerintah saja; h) tidak terlibat sama sekali. Berdasarkan hasil tanggapan dari responden yang

menyatakan ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan Program KOTAKU, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4. Keterlibatan dalam Menyusun Concept Plan

No	Variabel	Skala Penilaian	N	Bobot	N x Bobot
1	Keterlibatan dalam menyusun <i>concept plan</i>	Terlibat dalam menentukan konsep rencana pembangunan, memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan dan meninjau ulang rencana pembangunan	0	8	0
		Terlibat dalam menentukan konsep rencana pembangunan dan memiliki wewenang menentukan kebijakan yang mewakili kelompoknya	0	7	0
		Terlibat dalam menentukan konsep rencana pembangunan dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang setara dengan pemerintah	0	6	0
		Terlibat dalam menentukan konsep rencana pembangunan dengan memberikan pengaruh	13	5	65
		Ikut serta diskusi saja dalam penentuan konsep rencana pembangunan	0	4	0
		Ikut serta membantu menentukan konsep rencana pembangunan namun hanya untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu	0	3	0
		Ikut serta membantu menentukan konsep rencana	0	2	0

pembangunan namun hanya untuk kepentingan pemerintah saja				
Tidak terlibat sama sekali	57	1	57	
JUMLAH				122

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Dari hasil uraian diatas, juga dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatan dalam menyusun konsep rencana memiliki skor 122. Apabila mengacu pada tabel jumlah skoring tingkat partisipasi, maka jumlah skor tersebut masuk dalam tipologi *manipulation*. Dalam bentuk ini biasanya partisipasi dimaksudkan untuk mendidik atau membangun dukungan publik dengan memberi kesan bahwa pengambil keputusan sudah partisipatif. Padahal keputusan tidak diambil berdasarkan masukan dari proses partisipasi. Dalam bentuk ini biasanya yang digunakan adalah pola pembinaan, humas (*public relation*) dan lainnya.

d) Keterlibatan Dalam Menyetujui Draft

Untuk mengukur tingkat partisipasi dalam keterlibatan dalam menyetujui draft rencana digunakan skala penilaian mengacu pada tipologi Arnstein, yaitu delapan tangga partisipasi masyarakat. Depalan tangga tersebut adalah: a) masyarakat memberikan persetujuan setelah diberikan hak penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi jalannya rencana; b) masyarakat memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan yang dominan; c) masyarakat memberikan persetujuan karena telah ada kesamaan tujuan dengan pemerintah; d) masyarakat memberikan persetujuan karena merasa saran dipertimbangkan; e) masyarakat memberikan persetujuan karena telah ada dialog dua arah dengan pemerintah; f) masyarakat memberikan persetujuan untuk kepentingan masyarakat tertentu; g) masyarakat memberikan persetujuan untuk kepentingan pemerintah; h) masyarakat tidak ikut menyetujui. Berdasarkan hasil tanggapan dari responden yang menyatakan ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan

Program KOTAKU, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 5. Keterlibatan Dalam Menyetujui Draft Rencana

No	Variabel	Skala Penilaian	N	Bobot	N x Bobot
1	Keterlibatan dalam memenyetujui draft rencana	Masyarakat memberikan persetujuan setelah diberikan hak penuh untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi jalannya rencana	0	8	0
		Masyarakat memberikan persetujuan setelah diberi kewenangan untuk membuat keputusan yang dominan	0	7	0
		Masyarakat memberikan persetujuan karena telah ada kesamaan tujuan dengan pemerintah	0	6	0
		Masyarakat memberikan persetujuan karena merasa saran dipertimbangkan	0	5	0
		Masyarakat memberikan persetujuan karena telah ada dialog dua arah dengan pemerintah	0	4	0
		Masyarakat memberikan persetujuan untuk kepentingan masyarakat tertentu	13	3	36
		Masyarakat memberikan persetujuan untuk kepentingan pemerintah	57	2	114
		Masyarakat tidak ikut menyetujui	0	1	0
JUMLAH					150

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan tabel keterlibatan dalam keterlibatan dalam menyetujui draft rencana

diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan memberikan persetujuan untuk kepentingan pemerintah, yakni 57 dari 69 total responden yang menyatakan ikut berpartisipasi. Sedangkan 13 dari 69 total responden menyatakan memberi persetujuan untuk kepentingan masyarakat tertentu. Dari hasil uraian diatas, juga dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam keterlibatan dalam menyusun konsep rencana memiliki skor 150. Apabila mengacu pada tabel jumlah skoring tingkat partisipasi, maka jumlah skor tersebut masuk dalam tipologi *therapy*. Dalam bentuk ini biasanya disebut tahap pengobatan atau terapi kepada masyarakat. Pemegang kekuasaan mengganggu masyarakat tidak berdaya dalam mengambil suatu keputusan. Meskipun masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan namun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan untuk pengobatan kepada masyarakat.

Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai tingkat partisipasi masyarakat pada proses perencanaan Program KOTAKU diatas, maka dapat diperoleh hasil rangkuman sebagai berikut.

Tabel 6. Tingkat Partisipasi Masyarakat Secara Keseluruhan

No	Variabel	Skor
1	Kehadiran dalam pertemuan	248
2	Keaktifan dalam memberikan input, saran dan masukan	256
3	Keterlibatan dalam menyusun <i>concept plan</i>	122
4	Keterlibatan dalam menyetujui draft	150
Jumlah		776

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kehadiran dalam pertemuan memiliki skor 248 yang termasuk dalam tipologi *informing*. Selanjutnya keaktifan dalam memberikan input, saran dan masukan memperoleh skor 256, sehingga dikategorikan ke dalam tipologi *consultation*. Keterlibatan dalam menyusun *concept plan* memperoleh skor 122, sehingga dikategorikan ke dalam

tipologi *manipulation*. Dan terakhir, keterlibatan dalam menyetujui draft rencana memperoleh skor 150, sehingga dikategorikan ke dalam tipologi *therapy*. Setelah masing-masing indikator diketahui skornya, maka secara keseluruhan juga dapat diketahui skornya, adalah 776. Jika mengacu tabel partisipasi masyarakat yang telah dijelaskan dalam metode penelitian, maka tingkat partisipasi masyarakat pada proses perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Kungkung adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Skor Partisipasi

Jenjang Partisipasi Arnstein		Skor
8	<i>Citizen Control</i>	1965,5 sampai 2208
7	<i>Delegated Power</i>	1724 sampai 1966,5
6	<i>Partnership</i>	1482,5 sampai 1725
5	<i>Placation</i>	1241 sampai 1483,5
4	<i>Consultation</i>	999,5 sampai 1242
3	<i>Informing</i>	758 sampai 1000,5
2	<i>Therapy</i>	516,5 sampai 759
1	<i>Manipulation</i>	276 sampai 517,5

Sumber : Hasil Analisis, 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program KOTAKU di Kelurahan Kungkung adalah termasuk dalam tipologi *informing*. Pada tingkat *informing* dapat diartikan bahwa partisipasi bersifat semu dimana pada tahap ini, masyarakat diberikan informasi mengenai hak dan kewajiban. Namun hanya bersifat satu arah dan masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan Program KOTAKU belum diberikan kesempatan untuk mempengaruhi apapun, dan tidak terjadi umpan balik antara pemegang kekuasaan dan masyarakat

4. KESIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan studi yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai partisipasi masyarakat Kelurahan Kungkung pada proses perencanaan Program KOTAKU. Pada dasarnya, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan Program KOTAKU diperlukan guna menciptakan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) masyarakat terhadap kebelanjutan program-program yang dilakukannya. Sehingga masyarakat merasa memiliki tanggung jawab akan keberjalanan program sampai tahap keberlanjutan. Secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kungkung pada proses perencanaan Program KOTAKU dapat digolongkan ke dalam tipologi *informing*. Pada tingkat *informing* dapat diartikan bahwa partisipasi bersifat semu dimana pada tahap ini, masyarakat diberikan informasi mengenai hak dan kewajiban. Namun hanya bersifat satu arah dan masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan Program KOTAKU belum diberikan kesempatan untuk mempengaruhi apapun, dan tidak terjadi umpan balik antara pemegang kekuasaan dan masyarakat. Dengan demikian partisipasi masyarakat masih berada pada Derajat Partisipasi Semu (*Tokenisme*), yang berarti terjadi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat namun pengambilan keputusan masih berada di tangan penguasa/penyelenggara.

b. Saran

Setelah dilakukan analisis, maka rekomendasi yang dapat diberikan peneliti untuk partisipasi masyarakat pada proses perencanaan Program KOTAKU ini adalah :

1. Diharapkan kepada Penyelenggara program, perlunya memperhatikan partisipasi masyarakat mulai dari proses perencanaan program. Hal ini bisa ditingkatkan melalui pendampingan tim fasilitator kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi. Perlunya sosialisasi secara langsung dari tim fasilitator kepada masyarakat untuk menanamkan rasa kepemilikan program kepada masing-masing individu.

2. Kepada penguasa dan pihak penyelenggara, perlu memperhatikan tingkat partisipasi masyarakat. Hasil yang diperoleh dari analisis ialah partisipasi masyarakat hanya sebatas komunikasi satu arah saja. Diharapkan dengan adanya sosialisasi secara menyeluruh dan masyarakat diberi tanggungjawab lebih, akan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat hingga mencapai derajat partisipasi *citizen power*.

5. REFERENSI

- Chusnah, Ummul (2008). *Evaluasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Sarana Dan Prasarana Pendidikan di SMA Negeri 1 Surakarta*. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota. Universitas Diponegoro.
- Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2), 380-394.
- Fitra, Helmia Adita dan Anggerini, Mega (2016). *Kajian Tingkat Partisipasi Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Kota Semarang Yang Inklusif (Studi Kasus: Penyusunan Draft Rancangan Awal Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Ranwal-RPJMD) Kota Semarang 2016-2021)*. Riptek Vol. 10, No.1, Hal. 115-128.
- Girsang, Lisbet Juwita. 2011. *Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Perbaikan Jalan (kasus : PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Meganendug Bogor)*. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor.
- Isbandi, Adi Rukmianto (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Isnadi, (2007). *Proses Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Kebumen*. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Kekhususan Perencanaan Pembangunan Daerah. Universitas Brawijaya.
- LKM Kelurahan Kungkung (2015). *Dokumen Neighborhood Upgrading Action Plan (NUAP) Tahun 2015-2019*. Kelurahan Kungkung.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.
- Surat Keputusan (SK) Walikota Bandar Lampung Nomor: 974/V.32/HK/2014 Tentang Penetapan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2014.
- Tjahjono, Heru dkk. (2014). "Public Participation towards the Formulation of Environment friendly City Policy in Tulungagung" *International Journal of Applied Sociology*. Vol.4.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah